

ANALISIS FAKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN)

MUSTOFA

¹⁾Dosen STISIP Yuppentek
E-mail: mustofa@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan diantara faktor-faktor yang teridentifikasi mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Tangerang yang bersumberkan dari pengelolaan parkir daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Variabel penelitian terdiri dari komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3), struktur birokrasi (X4) dan Pendapatan Asli Daerah (Y). dimana untuk mengukurnya dipergunakan kuantitatif dengan jenis asosiatif yang menjelaskan hubungan diantara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Survey dilakukan terhadap 40 pegawai di Dinas Perhubungan Kota Tangerang yang dijadikan sampel dari jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 66. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengolahan data yang menggunakan paket program SPSS for Windows versi 20.00 tahun 2013 dengan metode analisis statistik korelasi, koefisien determinasi dan regresi linear. Adapun kesahihan instrumen dilaksanakan melalui uji validitas, realibitas, normalitas dan linearitas data. Hasil penelitian menunjukkan faktor imlementasi kebijakan (X1, X2, X3, dan X4) dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar sebesar 0,497 yang signifikan hasilnya pada selang kepercayaan lebih dari 95 %. sehingga untuk pengujian hipotesis pertama yang menyatakan : “Diduga terdapat pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi secara parsial terhadap terhadap implemmentasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014”, kesimpulannya dapat diterima pada selang kepercayaan 95 %.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan

global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dengan adanya perubahan atas undang-undang pemerintahan daerah tersebut memaksa Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk terus menerus meningkatkan potensi daerah yang dimilikinya agar bisa memanfaatkan peluang dalam menghadapi perubahan global pada sistem pemerintahan Negara. Kota Tangerang merupakan wilayah yang memiliki perkembangan yang sangat cepat dari tahun ketahun karena menjadi salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Indonesia (DKI Jakarta), perubahan tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat khususnya pada sektor kepemilikan kendaraan yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Seperti kita ketahui pertumbuhan volume kendaraan dan lahan parkir harus tumbuh seimbang karena bertambahnya jumlah kendaraan begitu pula kebutuhan ruang parkir akan bertambah. Kebutuhan akan ruang parkir akan semakin bertambah apabila sebagian besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk bepergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir.

Merespon perubahan dari masyarakat dan semakin meningkatnya volume jumlah kendaraan yang ada yang diikuti oleh kebutuhan ruang parkir di Kota Tangerang, maka pemerintah Kota Tangerang menerbitkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang didalamnya mengatur tentang retribusi parkir, dan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya mengatur tentang retribusi parkir berlangganan. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang tersebut merupakan amanah dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014, pasal 20A Ayat (1) disebutkan bahwa Guna menyelenggarakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang efektif dan efisien serta dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan

sistem parkir berlangganan. Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dapat dilaksanakan pemerintah daerah dengan pihak lain dan atau tempat lain yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang ?
3. Bagaimanakah tingkat pendapatan asli daerah Kota Tangerang yang bersumberkan dari pengelolaan parkir daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ?
4. Apakah faktor-faktor yang teridentifikasi mampu mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dan pendapatan asli daerah Kota Tangerang yang bersumberkan dari pengelolaan parkir daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitiannya adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
3. Untuk mengetahui tingkat pendapatan asli daerah Kota Tangerang yang bersumberkan dari pengelolaan parkir daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.
4. Untuk mengetahui hubungan diantara faktor-faktor yang teridentifikasi mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah

Kota Tangerang yang bersumberkan dari pengelolaan parkir daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014.

DEFINISI KONSEP VARIABEL

1. Kebijakan Publik
Woll yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa “Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.
2. Retribusi Daerah
Adrian (2008 : 74) : Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Faktor Implementasi Kebijakan
 - a. Komunikasi
Moekijat (2005:69) : “Komunikasi adalah merupakan suatu proses menyampaikan informasi antara satu pihak dengan pihak lain sehingga terjadi hubungan yang akan melahirkan suatu aktivitas tertentu sebagaimana ditetapkan sebelumnya”
 - b. Sumber Daya
Taliziduhu Ndraha (2001:1) “ Ada tiga macam sumber daya 1. Sumber Daya Alam (SDA) 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Sumber Daya Buatan (SDB)”. Selain itu faktor sumber daya (manusia, dana dan alam atau kondisi lingkungan) juga senantiasa berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi daerah di Kota Tangerang
 - c. Sikap Pelaksana
”Sikap dan itikad berupa keserempakan bersama secara konsisten dan konsekuen terhadap keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya” (Wahab, 2000 : 37)
 - d. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial

maupun aktual, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Ripley, 1973 : 10)

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan daerah, yang pada hakekatnya menempati posisi yang paling strategis bila di dibandingkan dengan sumber keuangan daerah lainnya, meskipun bila dilihat dari hasil yang diperolehnya masih menunjukkan hasil yang lebih rendah bila dibandingkan dari pendapatan daerah yang berasal dari pembagian dana dari hasil perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Bartambahnya perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan publik berhubungan erat dengan kesadaran yang makin berkembang, bahwa kebijakan publik di banyak bidang kurang efektif, dan khususnya ketidak-efektifan ini disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul sewaktu melaksanakan kebijakan itu.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir di Kota Tangerang.

Berlandaskan pada pengertian mengenai kebijakan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam menjelaskan implementasi kebijakan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang, peneliti mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Suharno (2010 : 31) yang berpendapat mengenai implementasi kebijakan yang ditentukan oleh 6 (enam) indikator yaitu :

- a. Tujuan yang akan dicapai dari kebijakan
- b. Prefensi nilai yang dipertimbangkan dalam kebijakan.

- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam kebijakan
- e. Lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan, dan
- f. Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut.

Keenam indikator kerangka kebijakan tersebut dijadikan acuan oleh peneliti untuk melihat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014.

Semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah kota atau kabupaten mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja satu jenis pajak atau retribusi dipungut oleh suatu daerah, tetapi tidak dipungut oleh daerah lainnya. Selain itu, walaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukannya dapat berbeda. Salah satu pendapatan asli daerah yang utama adalah berasal dari pungutan pajak dan retribusi daerah. Kewenangan untuk mengenakan pungutan, bukan sekedar sebagai sumber pendapatan sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan. Dengan adanya berbagai macam retribusi, maka jelaslah bahwa retribusi sampah hanyalah salah satu pendapatan asli daerah di Kota Tangerang, diantara sekian banyak retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Dalam praktek pelaksanaan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, sesungguhnya belum dapat sepenuhnya dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang utama bagi setiap pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dimana terdapat beberapa indikator terkait dengan pendapatan asli daerah yang khusus bersumberkan dari retribusi daerah, yaitu Pencapaian target retribusi, Pemanfaatan hasil retribusi, dan Pencapaian target PAD itu sendiri.

Dalam melaksanakan kebijakan pajak dan retribusi terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Edward dalam Wibawa (2000:43) menyebutkan ada 4

tahapan dalam melaksanakan kebijakan. Suatu kebijakan akan berhasil bila melalui 4 faktor variabel pendukung, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

HIPOTESIS

Hipotesis penelitian disusun sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi secara parsial terhadap terhadap implemmentasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014.
2. Diduga terdapat pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi secara simultan terhadap terhadap implemmentasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014.

METODE RISET

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan perhitungan statistik sebagai dasar pengolahan dan alat analisis data. Adapun metode kuantitatif yang digunakan termasuk ke dalam jenis asosiatif (hubungan), sebab variabel terdiri dari dua, yaitu variabel bebas (komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi) dan variabel terikat (pendapatan asli daerah). Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala yang terjadi dalam obyek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah petugas lapangan pemungut retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Tangerang berjumlah 66 orang pegawai, termasuk staf, pengawas dan koordinator retribusi di Dinas Perhubungan Kota Tangerang sebanyak 66 orang pegawai. Sedangkan sampelnya sebesar 40 orang yang diambil dengan teknik Slovin dengan tingkat error sampel sebesar 10 %.

Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi produk moment, koefisien determinasi dan regresi linear yang dianalisis baik secara sederhana ataupun ganda.

HASIL PENELITIAN

1. Analisa Statistik Dekriptif

Bila memperhatikan jawaban responden dalam tabel, maka dapat dijelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai rata-rata jawaban terendah dengan nilai 16,93 dan variabel komunikasi memiliki nilai rata-rata jawaban tertinggi dengan nilai 26,95. Kedua parameter tersebut sebagai dampak dari penilaian jawaban responden atas tanggapan

dari kuesioner pada nilai jawaban paling rendah dan paling tinggi dilihat dari intervalnya. Namun demikian, nilai sebaran nilai pusat dari keseluruhan variabel (mean, median dan modus) hampir berdekatan. Hal ini dapat dijadikan petunjuk bahwa pola sebaran data jawaban responden memiliki pola distribusi normal.

Tabel 1 Hasil analisis statistic deskriptif

		Statistics				
		Komunikasi.X1	Sumber Daya.X2	Sikap.X3	Struktur.X4	PAD.Y
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		26.95	21.93	25.53	25.53	16.93
Median		26.50	22.00	25.50	26.00	18.00
Mode		25 ^a	23	24 ^a	23 ^a	18 ^a
Std. Deviation		5.684	2.526	4.920	4.484	4.364
Variance		32.305	6.379	24.204	20.102	19.046
Skewness		.316	.772	.432	-.426	-.184
Std. Error of Skewness		.374	.374	.374	.374	.374
Kurtosis		-.506	2.026	-.008	-.853	-.986
Std. Error of Kurtosis		.733	.733	.733	.733	.733
Range		23	13	19	16	16
Minimum		18	17	17	16	8
Maximum		41	30	36	32	24

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2017

2. Pengujian Persyaratan Analisis

Pengujian persyaratan analisis data dipergunakan karena dalam perhitungan analisis lanjutan memerlukan persyaratan-persyaratan terhadap data yang diperoleh, semisal, data harus valid dan reliabel. Kemudian untuk pengujian korelasi diharuskan memenuhi persyaratan bahwa data dasar analisis harus memiliki pola penyebaran yang berdistribusi

normal, sedangkan untuk analisis regresi linear membutuhkan data yang berhubungan secara linear.

Dengan demikian, untuk pengujian persyaratan analisis data peneliti menggunakan pengujian validitas data, reliabilitas data, normalitas data dan linearitas data, yang hasilnya terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Pengujian persyaratan analisis data

No	Jenis Uji	Hasil	Kesimpulan
1.	Validitas Data	Semua nilai korelasi antara butir soal terhadap jumlah jawaban di atas 0,30	Semua butir soal dari ketiga variabel dinyatakan valid
2.	Reliabilitas Data	Nilai Reliabilitas Spearman Brown di atas 0,30 dengan metode <i>split-half</i>	Semua variabel dalam angket dinyatakan reliabel
3.	Normalitas Data	Nilai bagi antara <i>Skewness</i> dengan <i>Kurtosis</i> berada pada interval $-2 \leq d \leq 2$	Semua jawaban responden dari 5 variabel dinyatakan normal
4.	Linearitas Data	Nilai <i>linearity</i> adalah sebesar 12,028, 3,382, 5,889 dan 13,048 dengan nilai signifikan 0,002, 0,003, 0,002, dan 0,001	Data antara 2 variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear

Berdasarkan hasil perhitungan pada setiap analisis untuk persyaratan analisis pengujian hipotesis, semuanya dapat terpenuhi, baik itu pengujian validitas data, reliabilitas data, normalitas data ataupun linearitas datanya.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi produk momen.

Tabel 3 Hasil perhitungan korelasi parsial

		Correlations				
		Komunikasi. X1	Sumber.Daya. X2	Sikap. X3	Struktur. X4	PAD. Y
Komunikasi.X1	Pearson Correlation	1	.130	.328	.462	.448
	Sig. (2-tailed)		.424	.039	.003	.004
	N	40	40	40	40	40
Sumber.Daya.X2	Pearson Correlation	.130	1	.080	-.021	.395
	Sig. (2-tailed)	.424		.625	.896	.035
	N	40	40	40	40	40
Sikap.X3	Pearson Correlation	.328	.080	1	.387	.348
	Sig. (2-tailed)	.039	.625		.014	.044
	N	40	40	40	40	40
Struktur.X4	Pearson Correlation	.462	-.021	.387	1	.497
	Sig. (2-tailed)	.003	.896	.014		.001
	N	40	40	40	40	40
PAD.Y	Pearson Correlation	.448	.295	.148	.497	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.065	.363	.001	
	N	40	40	40	40	40

Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2017

Pada tabel di atas hasil analisis antara faktor imlementasi kebijakan (X₁, X₂, X₃, dan X₄) dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) secara terpisah untuk nilai korelasi komunikasi terhadap PAD sebesar 0,448 dengan tingkat signifikansi 0,004, untuk nilai korelasi sumber daya terhadap PAD sebesar 0,365 dengan tingkat signifikansi 0,035, untuk nilai korelasi sikap pelaksana terhadap PAD sebesar 0,348 dengan tingkat signifikansi 0,044, dan untuk nilai korelasi struktur birokrasi

terhadap PAD sebesar 0,497 dengan tingkat signifikansi 0,001.

Dengan demikian untuk pengujian hipotesis pertama yang menyatakan : “Diduga terdapat pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi secara parsial terhadap implemementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014”, kesimpulannya dapat diterima pada selang kepercayaan 95 %.

Tabel 4 Hasil perhitungan korelasi stimulus

		Correlations	
		Faktor.Kebijakan	PAD.Y
Faktor.Kebijakan	Pearson Correlation	1	.497**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	40	40
PAD.Y	Pearson Correlation	.497**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel di atas hasil analisis antara faktor imlementasi kebijakan (X₁, X₂, X₃, dan X₄) dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar sebesar 0,497 yang signifikan hasilnya pada selang kepercayaan lebih dari 95 % ($\alpha=0,001$). sehingga untuk pengujian hipotesis kedua yang menyatakan : “Diduga terdapat pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor

struktur birokrasi secara simultan terhadap terhadap implemementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014”, kesimpulannya dapat diterima pada selang kepercayaan 95 %.

4. Pengujian Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya maka digunakan rumus koefisien determinasi, yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 5 Hasil perhitungan koefisien determinasi

Variabel	r ² - hitung	KD	Kesimpulan
X ₁ ⇒ Y	0,201	20,1 %	Bepengaruh sebesar 20,1 %
X ₂ ⇒ Y	0,156	15,6 %	Bepengaruh sebesar 15,6 %
X ₃ ⇒ Y	0,121	12,1 %	Bepengaruh sebesar 12,1 %
X ₄ ⇒ Y	0,247	24,7 %	Bepengaruh sebesar 24,7 %
X ₁ , X ₂ , X ₃ , X ₄ ⇒ Y	0,247	24,7 %	Bepengaruh sebesar 24,7 %

Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2017

Uji determinasi pada dasarnya adalah hasil kuadrat dari koefisien korelasi kemudian dikalikan dengan seratus persen, sehingga nilai determinan diwujudkan dalam nilai persen.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi yang terangkum dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel komunikasi (X₁) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar 20,1 % dan sisanya sebesar 75,3 % dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya pengaruh variabel sumber daya (X₂) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar 15,6 % dan sisanya sebesar 79,9 % dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya pengaruh variabel sikap pelaksana (X₃) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar 12,1 % dan sisanya sebesar 84,4 % dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya pengaruh variabel struktur birokrasi (X₄) terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar

24,7 % dan sisanya sebesar 75,3 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Adapun apabila variabel komunikasi (X₁), variabel sumber daya (X₂), variabel sikap pelaksana (X₃) dan variabel struktur birokrasi (X₄) secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar 24,7 % dan sisanya sebesar 75,41 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang menjadi epsilon dalam penelitian atau di luar keempat variabel tersebut.

5. Pengujian Regresi Linear

Seperti diketahui sebelumnya bahwa data hasil pengujian persyaratan analisis menunjukkan bahwa data diantara variabel bebas dengan data dari variabel terikat menunjukkan hubungan yang linear, sehingga memenuhi syarat untuk pengujian regresi linear. Hasil analisisnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6 Hasil perhitungan analisis regresi linier X terhadap Y

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.924	6.212		-1.115	.273
	Komunikasi.X1	.193	.117	.252	1.653	.107
	Sumber.Daya.X2	.486	.231	.281	2.107	.042
	Sikap.X3	.112	.129	-.126	-.868	.391
	Struktur.X4	.424	.151	.436	2.804	.008

a. Dependent Variable: PAD.Y

Sumber : Hasil Analisis Data Kuantitatif Kuesioner, Penelitian 2017

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear yang terangkum dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan diantara antara variabel komunikasi (X₁), sumber daya (X₂), sikap pelaksana (X₃), dan struktur birokrasi (X₄) dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat memenuhi persamaan garis regresi linear

sebesar $\hat{Y} = 6,924 + 0,193X_1 + 0,486X_2 + 0,112X_3 + 0,424X_4$. Persamaan garis ini memberikan interpretasi bahwa faktor-faktor implementasi kebijakan retribusi parkir secara bersama-sama berhubungan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y).

PENUTUP

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor implementasi kebijakan (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar sebesar 0,497 yang signifikan hasilnya pada selang kepercayaan lebih dari 95 % ($\alpha=0,001$). sehingga untuk pengujian hipotesis pertama yang menyatakan : “Diduga terdapat pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi secara parsial terhadap terhadap implemmentasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014”, kesimpulannya dapat diterima pada selang kepercayaan 95 %.
2. Faktor yang paling dominan dari implementasi kebijakan retribusi parkir yaitu faktor struktur birokrasi kebijakan dengan nilai pengaruh sebesar 24,7 % dimana sisanya sebesar 75,3 % merupakan faktor lainnya diluar implemmentasi kebijakan retribusi parkir yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang.
3. Hubungan diantara antara variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), sikap pelaksana (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat memenuhi persamaan garis regresi linear sebesar $\hat{Y} = 6,924 + 0,193X_1 + 0,486X_2 + 0,112 X_3 + 0,424 X_4$. Persamaan garis ini memberikan interpretasi bahwa faktor-faktor implementasi kebijakan retribusi parkir secara bersama-sama berhubungan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y).

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian, antara lain :

1. Dinas Perhubungan hendaknya selalu memperhatikan dan mengevaluasi faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi karena terbukti berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang.
2. Dinas Perhubungan hendaknya betul-betul memperhatikan dampak terhadap faktor struktur birokrasi yang sudah terbangun

selama ini, karena faktor ini terbukti paling dominan dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang.

3. Dinas Perhubungan hendaknya mengevaluasi kebijakan tarif parkir di gedung tertutup yang selama ini dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Jangan sampai menimbulkan bias harga tarif parkir yang terlalu tinggi, seperti yang terjadi pada tahun 2015 di Tangcity Mall yang banyak menuai protes masyarakat.
4. Dinas Perhubungan hendaknya mempelajari kemungkinan pendapatan tarif parkir baru yang bersumber dari jasa penitipan parkir yang banyak dikelola oleh masyarakat secara informal dan bukan oleh pihak ketiga yang memiliki legalitas usaha formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. 2000. Manajemen Sumber Daya manusia, Hand Out Perkuliahan Manajemen SDM. Yogyakarta : MAP UGM.
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2010. Public Policy. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Suharno. 2010. Dasar -Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,. Alfabeta. Bandung
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wahab. Abdul Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Caps. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.